

Judul : Lima Anggota DPR Mulai Disidangkan
Tanggal : Selasa, 04 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Lima Anggota DPR Mulai Disidangkan

Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD seyogianya tidak menimbang aspek lain di luar substansi etik. Demi menjaga kepercayaan publik, MKD juga diharapkan bisa memenuhi ekspektasi masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS – Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD mulai menyidangkan perkara pelanggaran etik lima anggota DPR pada Senin (3/11/2025). Diharapkan, MKD tidak menimbang aspek lain di luar substansi etik dan mengambil putusan sesuai dengan suara publik. Sebab, keterangan yang muncul dalam persidangan justru lebih banyak menggiring narasi bahwa penonaktifan lima anggota DPR itu dipicu oleh informasi bohong.

Kelima anggota DPR yang tersangkut dugaan pelanggaran etik itu adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Partai Nasdem; Eko Hendro Purnomo dan Surya Utama dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN); serta Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar. Kelimanya sudah dinonaktifkan sebagai anggota DPR oleh partainya masing-masing pada 1 September 2025.

Persidangan di MKD berlangsung maraton selama total 4 jam dengan satu kali skors untuk istirahat makan siang.

Sesi pertama berlangsung sekitar 2,5 jam, dilanjutkan sesi kedua selama 1,5 jam. Sidang dipimpin Ketua MKD Nazarudin Dek Gam.

Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli itu, MKD DPR menghadirkan sejumlah pihak. Mereka, antara lain, Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR Suprihartini; Koordinator Orkestra Universitas Pertahanan (Unihan) Letkol Suwarko; ahli media sosial Ismail Fahmi; dan ahli kriminologi Adrianus Meliala. Selain itu, ahli hukum Satya Adiarto; ahli sosiologi Trubus Rahadiansyah; ahli analisis perilaku Gustia Ayudewi; serta Wakil Koordinator Wartawan Parlemen Erwin Siregar.

Dalam sidang itu, MKD menayangkan sejumlah konten media sosial berupa video yang dijadikan bukti. Di antaranya video aksi joget anggota DPR terduga serta pernyataan mereka. Sidang pun langsung berlanjut ke sesi tanya jawab.

Pertanyaan yang diajukan anggota MKD lebih banyak me-

nyoroti dampak berealita video tersebut hingga berujung pada penonaktifan para anggota Dewan. Beberapa pertanyaan bahkan terkesan mencari pembenaran atas tindakan para anggota DPR yang kini berstatus nonaktif.

Anggota MKD dari Fraksi Partai Gerindra, Habiurrohman, misalnya, mengatakan, satu-dua hari setelah sidang tahunan MPR ketika para anggota DPR berjoget, belum muncul pemberitaan negatif. Sidang tahunan MPR digelar pada 15 Agustus 2025.

Namun, setelah 17 Agustus 2025, kata Habiurrohman, mulai bermunculan hoaks. Saat itu, mulai dibuat video-video secara khusus bahwa anggota DPR itu menari-nari berjoget karena diumumkan kenaikan gaji. Padahal, tidak ada pengumuman kenaikan gaji.

"Lalu, ada keterangan Pak Sahroni, ada pernyataan Nafa Urbach, ada video Pak Eko, bahkan Uya Kuya tidak melakukan apa pun karena ada pihak tertentu yang memproduksi video

lama beliau, didaur ulang seolah-olah beliau meledek para pendiri DPT, dengan menampilkan video joget-joget dengan menyampaikan pendapatnya sebagai artis lebih besar," tuturnya.

Habiurrohman lantas menanyakan kepada ahli. "Ketika ada orang membuat narasi yang tidak sesuai dengan fakta bahwa disorot ajakan aksi melambatkan kekerasan, melawan tugas, batasannya di mana antara kebebasan berpendapat sama pelanggaran hukum?"

Terthadap pertanyaan Habiurrohman itu, Satya Adiarto menegaskan bahwa para anggota DPR berjoget karena adanya iringan lagu-lagu daerah. Menurut dia, hal itu tidak menjadi masalah karena merupakan bentuk ekspresi. Ia juga menambahkan bahwa video Uya Kuya merupakan video lama sehingga seharusnya tidak bisa dipermasalahkan.

Sebelumnya, Deputi Persidangan Setjen DPR Suprihartini menyampaikan bahwa tidak ada pembahasan kenaikan

gaji dalam Sidang Tahunan MPR 15 Agustus lalu. Ia justru menyayangkan pemberitaan di media-media yang justru menyalahgunakan acara kenegaraan tersebut untuk kepentingan-kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

MKD menggelar sidang etik untuk menindaklanjuti pengaduan yang masuk pada 4, 9, dan 30 September 2025. Adies Kadir diadakan karena pernyataannya mengenai tunjangan anggota DPR yang keliru dan menimbulkan reaksi luas di masyarakat. Nafa Urbach diadukan atas pernyataannya yang telah memberikan kesan hedon dan tamak, dengan menyampaikan bahwa kenaikan gaji dan tunjangan DPR merupakan sebuah kepastian dan wajar bagi wakil rakyat.

Sementara Surya Utama yang lebih dikenal sebagai Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio diadukan karena dianggap merendahkan DPR dengan berjoget pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, 15

Agustus lalu. Sementara Sahroni diadukan karena ucapan atau pernyataannya di hadapan publik dengan menggunakan diksi yang tidak pantas.

Kuatkan keputusan partai

Pengajar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan, MKD semestinya memperkuat keputusan partai politik (partai) terhadap lima anggota DPR tersebut. Pasalnya, keputusan setiap partai diambil karena mereka melihat ada pelanggaran etik yang dilakukan kelima legislator itu.

"Seyogianya MKD menguatkan keputusan partai, bukan malah keluar dari keputusan yang telah diambil partai terhadap lima anggota DPR itu," tuturnya.

Jamiluddin mengingatkan, MKD seharusnya tidak menimbang aspek lain di luar substansi etik dan mengambil keputusan di luar ekspektasi publik. "Kalau MKD mengambil keputusan di luar harapan masyarakat, takanlah lima anggota itu di-

akibatkan kembali, hal itu dapat berimplikasi terhadap kepercayaan masyarakat kepada DPR. Masyarakat akan merasa dipermainkan," katanya.

Tak sebatas itu, ia khawatir amarah masyarakat akan lebih besar jika mereka diaktifkan kembali. Jangan sampai putusan MKD justru semakin merusak kepercayaan publik. Padahal, keberadaan DPR sebagai lembaga legislatif sangatlah penting dalam negara demokrasi.

Mulai aktif

Setelah dua bulan tidak terlihat aktif, sejumlah anggota DPR yang terseret perkara etik mulai kembali muncul di hadapan publik. Sahroni, misalnya, menggelar pengajian dan doa bersama di halaman rumahnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (2/11). Dalam acara itu, Sahroni menceritakan kronologi saat penjarahan rumahnya terjadi pada akhir Agustus lalu. Ia juga menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi diri (BOW)